JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 2, 2026

EVEKTIVITAS PROGRAM STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN BALANGAN SANITASI LAYAK DAN AMAN (BASALAMAN) DALAM MENINGKATKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT MASYARAKAT DESA JU'UH KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BALANGAN

Marhamah[1], Ni Made Musiyani Anjasmari[2], Gusti Muhammad Hidayatullah[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email : marhamahnw7@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui penerapan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagaimana tertuang dalam Permenkes Nomor 3 Tahun 2021, dengan penekanan pada upaya Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS). Namun demikian, praktik BABS masih dijumpai di Desa Ju'uh, Kabupaten Balangan, walaupun Program BASALAMAN telah dilaksanakan. Kondisi ini dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan, kurangnya sosialisasi, serta belum adanya regulasi desa yang bersifat mengikat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Program Stop BABS dan BASALAMAN di Desa Ju'uh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pemilihan informan secara purposive sebanyak 12 orang. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahap kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan perpanjangan pengamatan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program BASALAMAN belum sepenuhnya efektif. Meskipun perencanaan telah dilakukan secara administratif dan ketepatan sasaran tergolong baik, rendahnya partisipasi masyarakat serta kuatnya budaya sungai menghambat perubahan perilaku. Program cenderung berorientasi pada pembangunan fisik tanpa pendampingan, evaluasi, dan pengawasan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, penguatan pendampingan perilaku, peran aktif pemerintah desa, serta partisipasi masyarakat untuk menjamin keberlanjutan program.

Kata kunci: Efektivitas Program, Stop Buang Air Besar Sembarangan, BASALAMAN, Sanitasi Lingkungan, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

ABSTRACT

The Indonesian government seeks to improve public health quality through the implementation of the Community-Based Total Sanitation (CBTS) Program, as stipulated in Minister of Health Regulation Number 3 of 2021, with a primary focus on eliminating open defecation (ODF). Nevertheless, the practice of open defecation persists in Ju'uh Village, Balangan Regency, despite the implementation of the BASALAMAN Program. This condition is influenced by weak supervision, limited socialization, and the absence of binding village-level regulations. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the Stop Open Defecation and BASALAMAN Programs in Ju'uh Village. This research employs a descriptive qualitative approach, with 12 informants selected through purposive sampling. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using data condensation, data display, and conclusion drawing. Data validity was ensured through prolonged engagement, triangulation, peer debriefing, negative case analysis, and member checking. The findings indicate that the implementation of the BASALAMAN Program has not been fully effective. Although administrative planning and target accuracy were relatively adequate, low community participation and a deeply rooted river-based culture hinder behavioral change. The program tends to focus on physical infrastructure development without sustained assistance, evaluation, and supervision. Therefore, enhanced socialization, strengthened behavioral facilitation, active involvement of village authorities, and increased community participation are necessary to ensure program sustainability.

***Keywords**: Program Effectiveness, Stop Open Defecation, BASALAMAN, Environmental Sanitation, Clean and Healthy Living Behavior (PHBS)*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui perbaikan sanitasi lingkungan. Hal ini diwujudkan melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Peraturan ini menjadi dasar pelaksanaan program nasional di bidang sanitasi yang menekankan perubahan perilaku masyarakat melalui pemberdayaan dan kesadaran kolektif. STBM merupakan pendekatan nasional untuk mengubah perilaku higienis dan saniter masyarakat dengan metode pemicuan (triggering) tanpa paksaan dan tanpa subsidi .

Tujuan utama dari program ini adalah untuk mewujudkan kondisi sanitasi total melalui lima pilar utama, di mana pilar pertama yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) menjadi dasar utama. Pilar ini bertujuan memutus rantai penularan penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan derajat kesehatan, serta mendorong terbentuknya Desa ODF (Open Defecation Free). Pelaksanaan program Stop BABS dilakukan melalui tahapan perencanaan, pemicuan, pembentukan kelompok kerja, pendampingan, hingga verifikasi dan deklarasi ODF.

Meskipun program STBM telah dilaksanakan secara nasional, perilaku buang air besar sembarangan masih ditemukan di beberapa wilayah. Sebagai bentuk adaptasi kebijakan nasional, Pemerintah Kabupaten Balangan meluncurkan program inovatif bernama Program Basalaman (Balangan Sanitasi Layak dan Aman). Program ini menekankan kolaborasi antara petugas kesehatan, aparat desa, dan masyarakat melalui penyuluhan, pendampingan pembangunan jamban sehat, serta pengawasan lingkungan.

Salah satu wilayah pelaksanaan Program Stop BABS dan Basalaman adalah Desa Ju'uh, Kecamatan Tebing Tinggi. Desa ini menjadi lokasi penelitian yang menarik karena sebagian masyarakatnya masih belum memiliki fasilitas sanitasi yang layak dan masih ditemukan praktik buang air besar sembarangan. Berdasarkan observasi awal, terdapat beberapa permasalahan yang menghambat efektivitas program di lapangan. Pertama, tidak adanya penerapan sanksi atau aturan tegas di tingkat desa (seperti Perdes) yang mengikat masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Permenkes No. 3 Tahun 2014, sehingga perilaku buruk masih terjadi. Kedua, kurangnya pengawasan menyebabkan masih terdapat bangunan jamban di bantaran sungai, dan sebagian warga masih membuang hajat langsung ke sungai karena faktor kedekatan lokasi. Ketiga, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media luar ruang, mengakibatkan kebiasaan tidak sehat terus berlanjut. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi program Stop BABS di Desa Ju'uh masih menghadapi kendala partisipasi, pendampingan, dan sosialisasi (Mutiarin and Zainudin, 2021).

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan Program Stop BABS dan Basalaman dalam meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat di Desa Ju'uh, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan.

Penelitian terkait efektivitas program sanitasi sebelumnya telah dilakukan oleh Rusmila (2021) dengan judul "Efektivitas Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOPS BABS) di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara". Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan menemukan bahwa program di wilayah tersebut belum berjalan efektif. Ketidakefektifan terlihat dari indikator waktu, biaya, dan jumlah fasilitas yang dibangun. Faktor penghambat utamanya meliputi kurangnya pengetahuan masyarakat yang menyebabkan fasilitas tidak berfungsi, bantuan WC gratis yang kurang tepat sasaran, serta minimnya sosialisasi (Rusmila, 2021). Kebaruan penelitian ini dibandingkan dengan temuan Rusmila (2021) terletak pada objek, cakupan program, dan pendekatan analisis. Jika penelitian Rusmila menelaah program Stop BABS secara umum, penelitian ini mengkaji Program BASALAMAN (Balangan Sanitasi

Layak dan Aman) yang merupakan inovasi kebijakan daerah dan pengembangan dari STBM dengan integrasi lima pilar. Selain itu, penelitian ini menggunakan model pengukuran efektivitas Campbell J.P. yang menilai program dari lima aspek utama secara komprehensif, yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, serta pencapaian tujuan menyeluruh.

Selain itu, penelitian serupa juga dilakukan oleh Luki Nur Nafi'ah (2019) mengenai "Efektivitas Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam mewujudkan Open Defecation Free (ODF) di Kelurahan Nusukan Surakarta". Menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa program STBM di lokasi tersebut sudah efektif dari segi pencapaian tujuan dan kepuasan sasaran, meskipun daya tangkap klien masih kurang (Nafi'ah, 2019). Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian Luki Nur Nafi'ah (2019) terletak pada konteks wilayah dan karakteristik masyarakat. Penelitian Luki dilakukan di wilayah perkotaan dengan fasilitas dan pendidikan masyarakat yang relatif baik. Sebaliknya, penelitian ini dilaksanakan di wilayah pedesaan, yaitu Desa Ju'uh, yang menghadapi tantangan lebih kompleks seperti keterbatasan sarana, budaya sungai yang kuat, serta minimnya pengawasan. Pendekatan teori Campbell J.P. dalam penelitian ini juga menjadi pembeda utama, karena tidak hanya berfokus pada status ODF sebagai hasil akhir, tetapi juga mengevaluasi proses pendampingan dan keberlanjutan program BASALAMAN secara mendalam.

METODE

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Ju'uh, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 71667.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara tepat mengenai keadaan atau realita yang terjadi di masyarakat serta mengungkap berbagai aspek dari sasaran penelitian secara mendalam dan holistic (Sugiyono, 2019).

Subjek penelitian atau informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang relevan dengan masalah penelitian. Terdapat 11 informan dalam penelitian ini, yang terdiri dari Tenaga Sanitasi Lingkungan dan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, Anggota BPD, serta masyarakat Desa Ju'uh. Sumber data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder berupa literatur, jurnal, dan dokumen arsip yang relevan (Moleong, 2018).

Fokus analisis efektivitas dalam penelitian ini didasarkan pada teori Campbell J.P., yang dioperasionalkan ke dalam lima indikator utama: (1) Keberhasilan program (perencanaan dan tujuan); (2) Keberhasilan sasaran (ketepatan sasaran dan tingkat pencapaian); (3) Kepuasan terhadap program (sarana prasarana dan kemampuan); (4) Tingkat input dan output (pelaksanaan, evaluasi, pendampingan); serta (5) Pencapaian tujuan menyeluruh (pengawasan dan komitmen).
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu: observasi lapangan untuk mengamati fenomena secara langsung, wawancara mendalam untuk menggali informasi dari informan, dan dokumentasi untuk mengumpulkan bukti tertulis atau arsip. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data yang meliputi peningkatan ketekunan pengamatan, penggunaan bahan referensi, dan member check. Selain itu, dilakukan triangulasi yang mencakup triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu untuk memverifikasi data dari berbagai sudut pandang (Moleong, 2018).

PEMBAHASAN

Evektivitas Program Stop Buang Air Besar Sembarangan Balangan Sanitasi Layak dan Aman (Basalaman) Dalam Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Masyarakat Desa Ju'uh Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan

1. Keberhasilan Program

a. Perencanaan Program

Perencanaan program merupakan hasil proses penyusunan daftar ketetapan mengenai langkah tindakan masa depan yang mencakup kegiatan, pelaksana, waktu, lokasi, serta sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan. Dalam konteks Program Basalaman di Desa Ju'uh, perencanaan telah dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa, pendataan masyarakat yang belum memiliki jamban, penentuan penerima bantuan, hingga penyusunan rencana teknis bersama Dinas Kesehatan dan aparat desa.

Berdasarkan hasil wawancara, indikator perencanaan ini dinilai cukup efektif secara prosedural karena tahapan-tahapan tersebut telah dijalankan. Namun, hasil observasi di lapangan menunjukkan fakta yang sedikit berbeda, di mana indikator ini dinilai kurang efektif. Ditemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah masih rendah, sehingga basis data yang digunakan lebih banyak bergantung pada laporan sepihak dari aparat desa dan Ketua RT. Selain itu, realisasi perencanaan terkendala oleh keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun tenaga teknis, yang menyebabkan pelaksanaan program tidak sepenuhnya sesuai dengan jadwal dan cakupan yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa aspek perencanaan program Basalaman di Desa Ju'uh kurang efektif. Meskipun secara administratif perencanaan telah melibatkan berbagai pihak (Dinas Kesehatan, Pemdes, RT/RW), namun ketidakhadiran masyarakat dalam musyawarah dan kesenjangan antara rencana dengan ketersediaan anggaran membuat implementasi di lapangan menjadi tidak optimal. Banyak warga yang berhak belum terjangkau, dan mekanisme pelaksanaan harus sering disesuaikan karena kendala teknis.

Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya sejalan dengan teori efektivitas Campbell sebagaimana dikutip oleh Mutiarin (2021:96). Teori tersebut menegaskan bahwa perencanaan harus jelas, terukur, dan mampu dilaksanakan sesuai rencana untuk mencapai hasil optimal. Dalam kasus ini, meskipun dokumen perencanaan tersedia, ketidaksesuaian antara rencana (plan) dan pelaksanaan (actuating) akibat minimnya sumber daya dan partisipasi menyebabkan efektivitas program pada tahap ini belum tercapai secara ideal.

b. Tujuan Pogram

Tujuan program merupakan tolak ukur utama untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan di lapangan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pencapaian ini mencakup kejelasan strategi, kesesuaian infrastruktur dengan rencana, keterlibatan aktor pelaksana, serta berjalannya sistem monitoring. Sebuah program dikatakan berhasil apabila tujuan tersebut tidak hanya tersampaikan secara administratif, tetapi juga mampu dipahami dan dijalankan oleh sasaran program secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara, indikator tujuan program ini dinilai cukup efektif. Aparat desa dan Dinas Kesehatan telah menyampaikan tujuan program secara jelas, dan sebagian besar masyarakat memahami bahwa program Basalaman bertujuan untuk

mencegah buang air besar di sungai, menciptakan lingkungan bersih, serta menekan angka penyakit seperti diare. Namun, temuan observasi di lapangan menunjukkan kondisi yang cenderung kurang efektif. Peneliti menemukan fenomena di mana masyarakat yang sudah memiliki jamban sehat (WC) masih tetap melakukan aktivitas buang air besar di sungai.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara pemahaman kognitif dan tindakan nyata. Observasi memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap tujuan program tidak merata; warga yang aktif mengikuti sosialisasi cenderung paham, sementara yang jarang terlibat masih memegang teguh kebiasaan lama. Faktor kenyamanan dan budaya sungai yang mengakar menjadi alasan mengapa tujuan perubahan perilaku belum sepenuhnya terwujud menjadi kesadaran kolektif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun tujuan program telah disosialisasikan, kesesuaian antara tujuan dan hasil pelaksanaan belum tercapai secara optimal. Hal ini belum sepenuhnya sejalan dengan teori efektivitas Campbell dalam Mutiarin (2021:96), yang menekankan bahwa efektivitas hanya tercapai jika tujuan program dipahami secara jelas oleh seluruh sasaran dan mampu memicu perubahan perilaku sesuai target. Dalam konteks Desa Ju'uh, transformasi perilaku dari buang air besar sembarangan menuju sanitasi aman masih terhambat oleh faktor kebiasaan, menandakan bahwa internalisasi tujuan program belum mencapai tingkat ideal.

2. Keberhasilan Sasaran

a. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran adalah indikator yang mengukur sejauh mana kelompok penerima manfaat program sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Suatu sasaran menggambarkan titik target yang harus dicapai oleh organisasi untuk memastikan sumber daya yang dikeluarkan benar-benar berdampak pada individu yang membutuhkan. Dalam konteks Program Basalaman, ketepatan sasaran berarti bantuan fasilitas sanitasi harus menjangkau warga yang belum memiliki jamban atau akses sanitasi layak.

Berbeda dengan aspek perencanaan yang menghadapi kendala, indikator ketepatan sasaran dalam pelaksanaan Program Basalaman di Desa Ju'uh terbukti sudah efektif. Hasil triangulasi data antara wawancara dan observasi memperlihatkan konsistensi yang kuat. Secara administratif, aparat desa telah melakukan verifikasi data secara ketat untuk memastikan bahwa calon penerima bantuan adalah warga yang belum memiliki fasilitas WC. Jika anggaran memungkinkan, prioritas selanjutnya diberikan kepada warga dengan kondisi WC yang rusak berat atau tidak layak pakai.

Observasi di lapangan mengonfirmasi temuan tersebut. Peneliti tidak menemukan adanya kasus salah sasaran atau tumpang tindih penerima bantuan. Rumah tangga yang menerima bantuan fisik adalah mereka yang sebelumnya memang tidak memiliki akses sanitasi pribadi. Proses seleksi yang dilakukan melalui pendataan dan tinjauan lapangan oleh aparat desa terbukti mampu meminimalisir potensi penyimpangan distribusi bantuan.

Keberhasilan pada aspek ini sejalan dengan teori efektivitas Campbell sebagaimana dikutip dalam Mutiarin (2021:96), yang menegaskan bahwa ketepatan sasaran adalah kunci efektivitas program. Ketika intervensi kebijakan diarahkan secara presisi kepada kelompok yang membutuhkan (intended beneficiaries), maka peluang keberhasilan outcome akan meningkat. Di Desa Ju'uh, ketepatan identifikasi penerima bantuan ini menjadi modal dasar yang baik dalam upaya mengurangi praktik buang air besar sembarangan, meskipun tantangan perubahan perilaku masih tersisa.

b. Tingkat Pencapaian

Tingkat pencapaian merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana tujuan atau misi sebuah program terealisasi, yang dapat dilihat dari aspek peningkatan fasilitas, kesesuaian pelaksanaan, dan ketercapaian hasil akhir. Dalam konteks sanitasi, tingkat pencapaian tidak hanya dihitung dari jumlah jamban yang terbangun, tetapi juga dari hilangnya perilaku buang air besar sembarangan secara total.

Berdasarkan analisis data, tingkat pencapaian Program Basalaman di Desa Ju'uh dinilai kurang efektif. Terdapat dua sisi mata uang dalam pencapaian ini. Di satu sisi, secara fisik terdapat capaian positif yang signifikan. Hasil wawancara menyebutkan bahwa akses sanitasi telah meningkat hingga kisaran 90% hingga 98% berkat dukungan program "1000 rumah 1000 jamban" yang mempercepat pembangunan sarana WC. Namun, di sisi lain, keberhasilan pembangunan fisik ini belum diikuti oleh perubahan perilaku (behavioral change) yang menyeluruh.

Hasil observasi memperkuat temuan bahwa ketersediaan fasilitas tidak otomatis menghentikan kebiasaan lama. Peneliti menemukan fakta bahwa masyarakat masih memanfaatkan sungai untuk mandi, mencuci, dan buang air besar, terutama karena alasan kenyamanan dan kebiasaan turun-temurun. Selain itu, keterbatasan anggaran menyebabkan distribusi jamban belum merata 100%, sehingga sebagian kecil warga memang belum memiliki fasilitas. Ketimpangan antara tingginya angka ketersediaan fasilitas dengan rendahnya pemanfaatan fasilitas menunjukkan bahwa tujuan intrinsik program belum tercapai.

Temuan ini belum sepenuhnya sejalan dengan teori efektivitas Campbell dalam Mutiarin (2021:96), yang mensyaratkan bahwa tingkat pencapaian harus bersifat holistic mencakup peningkatan fasilitas, perubahan perilaku, dan tercapainya misi program secara utuh. Pada kasus Desa Ju'uh, pencapaian baru berhasil pada tahap output (fisik bangunan), namun belum berhasil pada tahap outcome (perubahan budaya sanitasi). Oleh karena itu, tingkat pencapaian program belum dapat dikatakan optimal sesuai standar teoretis.

3. Kepuasan Terhadap Program

a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan fasilitas pendukung vital yang menunjang kelancaran kegiatan organisasi. Dalam konteks implementasi kebijakan publik, manajemen sarana yang baik sangat menentukan sukses tidaknya suatu program. Pada Program Basalaman, aspek ini dinilai dari ketersediaan bantuan material dan fasilitas fisik yang diberikan kepada penerima manfaat.

Berdasarkan hasil triangulasi data yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, indikator Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan Program Basalaman di Desa Ju'uh terbukti sudah efektif. Pemerintah desa bersinergi dengan Dinas Kesehatan tidak hanya memberikan sosialisasi, tetapi juga intervensi fisik berupa penyediaan bahan bangunan lengkap (semen, batako, pipa, dan kloset) serta penyediaan tenaga tukang. Hal ini dikonfirmasi oleh seluruh informan yang menyatakan bahwa paket bantuan "terima jadi" ini sangat membantu masyarakat, terutama warga kurang mampu yang sebelumnya terkendala biaya pembangunan.

Observasi lapangan memperlihatkan bahwa bahan bangunan yang didistribusikan memiliki kualitas yang memadai dan kuantitas yang cukup untuk membangun satu unit jamban standar. Ketersediaan sarana ini secara langsung mempercepat proses pembangunan fisik di rumah-rumah warga. Temuan ini diperkuat dengan bukti

dokumentasi berupa foto-foto proses pengerjaan yang menunjukkan para tukang yang ditunjuk sedang bekerja menggunakan material yang disediakan program hingga jamban siap digunakan. Meskipun terdapat catatan kecil mengenai belum adanya layanan penyedotan tinja, namun secara umum kebutuhan dasar konstruksi sanitasi telah terpenuhi dengan baik.

Keberhasilan penyediaan fasilitas ini sejalan dengan teori Campbell dalam Mutiarin (2021:96) yang menempatkan sarana dan prasarana memadai sebagai faktor penentu keberhasilan program. Ketersediaan infrastruktur fisik yang didukung oleh tenaga pelaksana (tukang) menunjukkan bahwa program Basalaman telah memenuhi prasyarat teknis (input) dengan sangat baik. Dengan tersedianya fasilitas yang layak ini, hambatan fisik untuk berperilaku hidup bersih dan sehat telah dihilangkan, sehingga kepuasan masyarakat terhadap program pada aspek ini tergolong tinggi.

b. Kemampuan

Kemampuan pelaksana merujuk pada kapasitas individu atau tim dalam menjalankan beragam tugas yang dimandatkan dalam suatu program. Dalam Program Basalaman, indikator ini menilai kecakapan aparat desa dan petugas kesehatan dalam mengelola tahapan program, mulai dari pendataan, distribusi logistik, hingga pengawasan konstruksi.

Berdasarkan hasil triangulasi antara wawancara dan observasi, indikator kemampuan pelaksana di Desa Ju'uh dinilai cukup efektif, namun memiliki dua sisi yang berbeda. Pada sisi teknis-administratif, kemampuan pelaksana sudah berjalan sangat baik. Aparat desa dinilai cakap dan komitmen dalam melakukan pendataan penerima manfaat, memfasilitasi distribusi bahan bangunan, serta mengawasi proses pembangunan jamban hingga selesai. Seluruh prosedur teknis pembangunan fisik telah dijalankan sesuai tanggung jawab masing-masing.

Akan tetapi, pada sisi non-teknis, khususnya kemampuan dalam edukasi dan pembinaan perilaku, hasil observasi menunjukkan masih adanya kelemahan. Kemampuan aparat dalam melakukan pendekatan persuasif untuk mengubah kebiasaan masyarakat belum maksimal. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya warga yang buang air besar di sungai meskipun fasilitas fisik sudah terbangun. Kurangnya intensitas sosialisasi dan pengawasan perilaku pasca-konstruksi menandakan bahwa kapasitas pelaksana sebagai agen perubahan sosial masih perlu ditingkatkan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa hasil penelitian belum sepenuhnya sejalan dengan teori efektivitas Campbell dalam Mutiarin (2021:96). Teori tersebut menekankan bahwa keberhasilan program bergantung pada kemampuan pelaksana dalam pengelolaan sumber daya sekaligus komunikasi yang efektif. Di Desa Ju'uh, kemampuan pengelolaan sumber daya (fisik) sudah terbukti efektif, namun kemampuan komunikasi (sosialisasi perubahan perilaku) masih menjadi titik lemah yang menghambat tercapainya tujuan program secara paripurna.

4. Tingkat Input dan Output

a. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang didukung oleh kebijakan, prosedur, dan sumber daya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Dalam konteks ini, efektivitas diukur dari sejauh mana prosedur yang dijalankan mampu menghasilkan output yang fungsional dan outcome berupa perubahan perilaku.

Berdasarkan hasil penelitian, indikator pelaksanaan Program Basalaman di Desa Ju'uh dinilai kurang efektif. Terdapat kesenjangan yang nyata antara prosedur teknis dan

realitas lapangan. Secara administratif dan teknis konstruksi, pelaksanaan program telah berjalan sesuai prosedur—mulai dari perencanaan, verifikasi data, distribusi material, hingga pembangunan fisik jamban. Dinas Kesehatan dan pemerintah desa telah menjalankan peran teknisnya dengan baik.

Namun, efektivitas pelaksanaan tercederai oleh rendahnya tingkat pemanfaatan fasilitas oleh masyarakat (utilization rate). Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa meskipun jamban telah terbangun, sebagian penerima bantuan tidak menggunakannya dan tetap kembali ke kebiasaan lama buang air besar di sungai. Kegagalan ini disebabkan oleh beberapa faktor: (1) Pelaksanaan program yang terlalu berfokus pada pembangunan fisik tanpa diimbangi pendampingan pasca-konstruksi yang intensif; (2) Keterbatasan anggaran yang memaksa pelaksanaan dilakukan secara bertahap sehingga menimbulkan ketimpangan pemerataan; dan (3) Ketiadaan fasilitas pendukung keberlanjutan seperti layanan penyedotan tinja.

Kondisi ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori efektivitas Campbell dalam Mutiarin (2021:96). Teori tersebut menekankan bahwa pelaksanaan program yang efektif tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban prosedur, tetapi harus didukung oleh sumber daya yang memadai dan partisipasi aktif masyarakat untuk menjamin keberhasilan outcome. Di Desa Ju'uh, pelaksanaan program terjebak pada keberhasilan output fisik semata, namun gagal dalam mendorong transformasi perilaku hidup bersih dan sehat yang menjadi tujuan substansial program.

b. Evaluasi

Evaluasi didefinisikan sebagai proses pengumpulan informasi secara kritis untuk menilai kinerja kebijakan, meningkatkan efektivitas, dan menjadi dasar pengambilan keputusan. Dalam siklus manajemen program, evaluasi berfungsi sebagai mekanisme umpan balik untuk mengetahui apakah output yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Berdasarkan temuan di lapangan, fungsi evaluasi pada Program Basalaman di Desa Ju'uh dinilai belum efektif. Terdapat kesenjangan koordinasi yang nyata dalam pelaksanaannya. Meskipun pihak Dinas Kesehatan menyatakan memiliki agenda evaluasi tahunan, implementasi real di tingkat desa justru tidak berjalan. Hasil triangulasi data wawancara mengungkap bahwa setelah fasilitas jamban diserahterimakan, tidak ada kunjungan lanjutan atau kontrol rutin dari pemerintah desa maupun petugas terkait kepada penerima bantuan.

Data observasi memperkuat temuan ini dengan tidak ditemukannya bukti aktivitas monitoring lapangan, seperti buku pencatatan pemanfaatan jamban atau jadwal peninjauan kondisi fisik sarana pasca-konstruksi. Absennya mekanisme kontrol (monitoring) ini menyebabkan tingkat keberhasilan program khususnya terkait konsistensi perubahan perilaku tidak dapat terukur. Tanpa adanya evaluasi yang melekat, warga yang telah menerima bantuan cenderung kembali pada kebiasaan lama membuang hajat di sungai karena merasa tidak ada pihak yang memantau atau mengevaluasi tindakan mereka.

Kondisi ini bertentangan dengan teori Campbell dalam Mutiarin (2021:96) yang menempatkan evaluasi sebagai instrumen vital untuk menjamin efektivitas program. Teori tersebut menekankan bahwa tanpa evaluasi yang rutin, menyeluruh, dan berjenjang, pembuat kebijakan kehilangan basis data akurat untuk merumuskan perbaikan. Akibat ketiadaan evaluasi ini, kendala kultural di masyarakat tidak terdeteksi dan tidak tertangani

sejak dini, sehingga tujuan akhir untuk menciptakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menjadi sulit tercapai secara optimal.

c. Pendampingan

Pendampingan merupakan proses pemberian bimbingan, arahan, dan dukungan berkelanjutan kepada masyarakat untuk memastikan mereka tidak hanya menerima fasilitas fisik, tetapi juga mampu memanfaatkannya dengan benar. Dalam konteks perubahan perilaku sanitasi, pendampingan berfungsi sebagai "pengawal" agar masyarakat tidak kembali pada kebiasaan lama setelah program berakhir.

Berdasarkan hasil penelitian, indikator pendampingan pada Program Basalaman di Desa Ju'uh dinilai belum efektif. Data lapangan menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan tidak dilakukan secara rutin maupun terjadwal. Hasil wawancara mengungkap fakta bahwa interaksi pembinaan hanya terjadi satu kali pada saat musyawarah awal. Padahal, menurut standar teknis Dinas Kesehatan, pendampingan idealnya dilakukan secara berkala (setiap tiga minggu sekali) untuk memantau perkembangan perilaku warga. Namun, realisasinya nihil.

Observasi peneliti memperkuat temuan ini dengan tidak ditemukannya agenda kegiatan pasca-konstruksi, seperti kunjungan rumah (home visit), sosialisasi perawatan jamban, atau forum diskusi kesehatan warga. Setelah fasilitas jamban selesai dibangun dan diserahkan, masyarakat dibiarkan mengelola sarana tersebut secara mandiri tanpa arahan teknis maupun motivasi psikologis. Akibat minimnya kehadiran petugas pendamping, dorongan edukatif menjadi hilang, sehingga sebagian masyarakat merasa "aman" untuk kembali melakukan aktivitas buang air besar di sungai.

Kondisi ini belum sesuai dengan teori efektivitas Campbell dalam Mutiarin (2021:96) yang menegaskan bahwa pendampingan adalah pilar krusial dalam keberhasilan program berbasis masyarakat. Teori tersebut menggarisbawahi bahwa dukungan berkelanjutan diperlukan untuk menanamkan nilai-nilai baru hingga menjadi kebiasaan. Ketiadaan fungsi pendampingan dalam Program Basalaman menyebabkan terputusnya rantai transfer pengetahuan (knowledge transfer) dan pembentukan karakter, sehingga efektivitas program secara keseluruhan menjadi terhambat.

5. Pencapain Menyeluruh

a. Pengawasan Program

Pengawasan program merupakan proses manajerial untuk menetapkan ukuran kinerja dan mengambil tindakan korektif guna memastikan hasil yang dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam konteks keberlanjutan program sanitasi, pengawasan tidak boleh berhenti pada saat serah terima bangunan, melainkan harus berlanjut pada pemantauan fungsi dan pemanfaatan.

Berdasarkan analisis data lapangan, indikator pengawasan pada Program Basalaman di Desa Ju'uh dinilai belum efektif. Hasil triangulasi antara wawancara dan observasi menunjukkan temuan yang konsisten: pemerintah desa tidak lagi menjalankan fungsi kontrol setelah fasilitas jamban selesai dibangun dan diserahkan kepada warga. Tidak ditemukan adanya mekanisme pengawasan lanjutan (post-construction monitoring) untuk memastikan apakah jamban tersebut benar-benar digunakan, dirawat, atau justru terbengkalai.

Absennya pengawasan ini berimplikasi pada ketidaktahuan pelaksana program terhadap efektivitas penggunaan sumber daya yang telah disalurkan. Tanpa adanya pemantauan, potensi penyimpangan perilaku masyarakat tidak terdeteksi, sehingga langkah

perbaikan tidak dapat diambil. Pemerintah desa seolah menganggap tugas telah selesai saat bangunan fisik berdiri, padahal esensi program adalah perubahan perilaku yang membutuhkan pengawasan berkesinambungan.

Kondisi ini tidak sejalan dengan teori Campbell dalam Mutiarin (2021:96) yang menegaskan bahwa pengawasan adalah syarat mutlak untuk mengukur kinerja dan menjamin pencapaian hasil. Teori tersebut menyiratkan bahwa tanpa tindakan pengawasan yang aktif, mustahil untuk menilai apakah tujuan menyeluruh program telah tercapai secara efektif dan efisien. Di Desa Ju'uh, kekosongan fungsi pengawasan ini menjadi salah satu faktor utama mengapa tujuan program belum terwujud secara optimal.

b. Komitmen

Komitmen didefinisikan sebagai bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat individu atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Dalam sebuah organisasi atau program publik, komitmen berfungsi untuk menyatukan visi dan misi, memastikan bahwa setiap pihak tidak hanya sekadar berpartisipasi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap keberhasilan jangka panjang.

Berdasarkan hasil penelitian, indikator komitmen dalam pelaksanaan Program Basalaman di Desa Ju'uh dinilai kurang efektif. Kelemahan komitmen ini teridentifikasi dari dua arah, yaitu dari sisi pemerintah desa dan sisi masyarakat. Dari sisi pemerintah desa, belum ditemukan adanya komitmen formal yang dituangkan dalam bentuk aturan tertulis (Perdes), kesepakatan bersama, atau regulasi sanksi yang mengikat warga untuk meninggalkan perilaku buang air besar sembarangan. Selain itu, komitmen anggaran juga masih lemah; keterbatasan dana desa membuat realisasi pemenuhan kebutuhan jamban tidak dapat dilakukan secara tuntas dan menyeluruh, melainkan bergantung pada pendataan bertahap yang tidak pasti.

Di sisi lain, komitmen masyarakat juga dinilai rendah. Hasil observasi memperlihatkan bahwa tanpa adanya "paksaan" berupa aturan atau pengawasan yang ketat, masyarakat tidak memiliki dorongan internal yang kuat untuk mengubah perilaku. Sebagian warga yang telah menerima bantuan fasilitas fisik justru mengingkari tujuan program dengan kembali melakukan aktivitas di sungai. Absennya kontrak sosial antara desa dan warga menyebabkan program berjalan tanpa pondasi moral yang kuat.

Temuan ini belum sejalan dengan teori Campbell dalam Mutiarin (2021:96), yang mensyaratkan bahwa efektivitas program hanya dapat dicapai jika terdapat dedikasi dan kewajiban bersama yang dimanifestasikan dalam tindakan nyata. Teori tersebut menekankan bahwa komitmen harus lebih dari sekadar dukungan lisan; ia harus berwujud kesepakatan dan dukungan sumber daya yang konsisten. Di Desa Ju'uh, ketiadaan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak menyebabkan visi program untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan layak sanitasi sulit terwujud secara optimal.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas pelaksanaan Program Basalaman di Desa Ju'uh dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, baik yang bersifat penghambat maupun pendukung. Interaksi antar faktor tersebut menentukan capaian program dalam mendorong perubahan perilaku sanitasi masyarakat.

Dari sisi faktor penghambat, penelitian ini mengidentifikasi tiga aspek utama. Pertama, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sanitasi kesehatan. Temuan wawancara menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum menyadari secara utuh dampak negatif perilaku buang air besar sembarangan terhadap kesehatan dan lingkungan, sehingga pembangunan jamban

belum dipandang sebagai kebutuhan prioritas. Kondisi ini tercermin dari hasil observasi yang memperlihatkan minimnya perubahan perilaku meskipun sarana sanitasi telah tersedia. Kedua, kebiasaan dan budaya sungai yang telah mengakar kuat di tengah masyarakat. Aktivitas mandi, mencuci, dan buang air di sungai masih dipraktikkan karena dianggap lebih praktis dan nyaman. Keberadaan jamban apung yang masih digunakan secara aktif menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan fisik belum sepenuhnya efektif dalam mengubah kebiasaan masyarakat tanpa disertai upaya perubahan sosial yang berkelanjutan. Ketiga, lemahnya penerapan sanksi dan pengawasan di tingkat desa. Ketiadaan regulasi desa maupun sanksi yang bersifat mengikat menyebabkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap tujuan program relatif rendah, meskipun telah direncanakan program lanjutan untuk penghapusan jamban apung.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor pendukung yang berperan menjaga keberlangsungan Program Basalaman. Musyawarah desa berfungsi sebagai forum strategis dalam proses sosialisasi kebijakan, validasi data penerima bantuan, serta identifikasi kebutuhan sanitasi secara partisipatif. Mekanisme ini berkontribusi terhadap ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan fasilitas sanitasi.

Selain itu, dukungan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan menjadi faktor penting dalam penyediaan sumber daya, baik dalam bentuk anggaran maupun material pembangunan jamban. Program inovatif seperti “1000 Rumah 1000 Jamban” memberikan dorongan signifikan bagi pemerintah desa untuk tetap melaksanakan program di tengah tantangan sosial yang dihadapi. Faktor pendukung lainnya adalah koordinasi antar pelaksana yang relatif berjalan baik, ditunjukkan melalui sinergi antara Dinas Kesehatan, pemerintah desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Koordinasi lintas sektor ini menjadi modal institusional yang mendukung keberlanjutan program, meskipun capaian perubahan perilaku masyarakat masih belum optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas Program Stop Buang Air Besar Sembarangan Balangan Sanitasi Layak dan Aman (Basalaman) di Desa Ju’uh, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program secara umum belum berjalan efektif. Mengacu pada teori Campbell J.P., ketidakefektifan ini disebabkan oleh ketimpangan antara keberhasilan pembangunan fisik dan kegagalan perubahan perilaku masyarakat. Secara rinci, aspek yang telah berjalan efektif meliputi indikator Ketepatan Sasaran dan Sarana Prasarana. Program berhasil mengidentifikasi warga yang membutuhkan bantuan secara presisi dan mampu menyediakan fasilitas fisik (bahan bangunan dan tenaga tukang) yang memadai. Selain itu, Kemampuan Pelaksana dari sisi teknis administratif juga dinilai sudah baik dalam memfasilitasi konstruksi jamban.

Namun, efektivitas program terhambat pada aspek Perencanaan, Evaluasi, Pendampingan, Pengawasan, dan Komitmen yang dinilai kurang hingga belum efektif. Ditemukan bahwa perencanaan program kurang partisipatif, serta fungsi manajemen (monitoring dan evaluasi) terputus setelah serah terima bantuan fisik. Ketiadaan pendampingan rutin dan lemahnya komitmen baik dari pemerintah desa yang belum menerbitkan regulasi (Perdes) maupun masyarakat yang enggan mengubah kebiasaan menyebabkan fasilitas yang dibangun tidak dimanfaatkan secara optimal.

Esensi temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Program Basalaman di Desa Ju’uh baru berhasil pada tahap output (ketersediaan infrastruktur sanitasi), namun belum berhasil mencapai outcome (terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat/ODF). Keberhasilan fisik semata tidak cukup

tanpa didukung oleh rekayasa sosial melalui pengawasan ketat, penegakan aturan desa, dan edukasi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Moleong, L.J. (2018) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mutiarin, D. and Zainudin, A. (2021) *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nafi'ah, L.N. (2019) 'Efektivitas Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam Mewujudkan Open Defecation Free (ODF) di Kelurahan Nusukan Surakarta'.

Rusmila (2021) 'Efektivitas Program Stop Buang Air Besar Sembarangan di Kecamatan Sungai Pandan'.

Sugiyono (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.